

## SEKOLAH GURU PENDIDIKAN DJASMANI (SGPD) DI YOGYAKARTA (1950-1963)

Penulis 1 : Wahyu Ida Permatasari  
Penulis 2 : Rhoma Dwi Aria Y. M.Pd.  
Universitas Negeri Yogyakarta  
wahyuidapermatasari@gmail.com

### ABSTRAK

Sekolah Guru Pendidikan Djasmani (SGPD) merupakan sekolah yang mencetak guru pendidikan jasmani pertama di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui tentang pendidikan jasmani pada masa kolonial hingga awal kemerdekaan Indonesia. (2) mengetahui latar belakang berdirinya SGPD dan sistem pendidikan di SGPD Yogyakarta (3) mengetahui proses kegiatan belajar mengajar di SGPD Yogyakarta. Menggunakan tahapan penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo yang terdiri dari lima tahapan. (1) pemilihan topik berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. (2) pengumpulan sumber primer dan sekunder, (3) verifikasi atau kritik sumber, (4) interpretasi, (5) historiografi atau penulisan sejarah.

Hasil penelitian ini adalah: (1) Pendidikan jasmani ialah pendidikan untuk mengolah badan, memperkuat badan agar tidak ada gangguan kesehatan. Pendidikan jasmani mulai masuk ke dalam pendidikan formal di mulai tahun 1918. Sampai awal kemerdekaan Indonesia pendidikan jasmani disebut dengan istilah gerak badan. (2) Diberlakukannya Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran No. 4 tahun 1950 menjadi dasar masuknya pendidikan jasmani ke dalam pendidikan di Indonesia. Adanya undang-undang tersebut mendorong Kementerian PP dan K mengeluarkan kebijakan membuka sekolah guru pendidikan jasmani. Tahun 1950 dibuka Sekolah Guru Pendidikan Djasmani (SGPD) pertama Yogyakarta. SGPD Yogyakarta Sistem pendidikan di SGPD terdiri dari beberapa unsur yaitu, guru, peserta didik, sarana prasarana dan kurikulum. (3) Kegiatan belajar mengajar di SGPD Yogyakarta terbagi dalam dua tempat yakni di kelas dan di asrama. Model pembelajaran ini meniru model Taman Siswa. SGPD Yogyakarta sebagai sekolah berbasis pendidikan jasmani mampu membuktikan prestasi diberbagai perlombaan pendidikan jasmani tingkat nasional.

Kata Kunci: *Pendidikan Jasmani, SGPD, Yogyakarta, 1950-1963.*

### ABSTRACT

*Physical Education Teacher School (PETS) was the first school preparing physical education teachers in Indonesia. This study aimed to investigate: (1) physical education during the colonial era and in the early days of the independence of Indonesia, (2) the background of the establishment of PETS and the system of education at PETS of Yogyakarta, and (3) the teaching and learning process at PETS of Yogyakarta.*

*The study employed the historical research method according to Kuntowijoyo, consisting of five steps, namely: (1) the topic selection based on emotional and intellectual intimacy, (2) collection of primary and secondary sources, (3) verification or source criticism, (4) interpretation, and (5) historiography or history writing.*

*The results of the study were as follows. (1) Physical education is education to cultivate and strengthen the body in order to prevent health problems. Physical education began to be included in formal education in 1918. Until the early days of the independence of Indonesia, physical education was called body movement (exercise). (2) The enactment of the Act of Education and Teaching No. 4 Year 1950 became the basis for the inclusion of physical education into education in Indonesia. The enactment of the*

*Act encouraged the Ministry of Education, Teaching, and Culture to issue a policy to establish a physical education teacher school. In 1950, the Physical Education Teacher School (PETS) was opened in Yogyakarta. The system of education at PETS consisted of several elements, namely teachers, students, infrastructure facilities, and curriculum. (3) The teaching and learning activities at PETS of Yogyakarta were conducted in two places, namely the classroom and the dormitory. The learning model imitated the model in Taman Siswa. PETS of Yogyakarta as a physical-education-based school was capable of having achievements in a variety of educational competitions at the national level.*

**Keywords:** *Physical Education, PETS, Yogyakarta, 1950-1963.*

## **I. Pendahuluan**

Kemerdekaan bangsa Indonesia merupakan perkembangan kehidupan masyarakat dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Menjadi bangsa yang merdeka membutuhkan upaya-upaya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan kemerdekaan. Cita-cita dan tujuan kemerdekaan bangsa ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yakni terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.<sup>1</sup>

Secara garis besar dapat dikatakan cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia adalah membebaskan diri dari kebodohan, keterbelakangan, dan kemiskinan. Pembebasan ketiga hal tersebut diwujudkan dengan cara dibentuknya Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan<sup>2</sup> pada awal kemerdekaan. Kementerian ini bertugas untuk menentukan landasan hukum dalam melaksanakan pendidikan.

PP dan K yang diketuai oleh Mr. Soewandi sebelum tahun 1950 telah membentuk Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran yang diketuai oleh Ki Hadjar Dewantara pada tahun 1946.<sup>3</sup> Pembentukan panitia tersebut didasari atas perlunya Indonesia mempunyai landasan hukum dalam pelaksanaan pendidikan. Tugas panitia tersebut adalah meninjau kembali dasar-dasar, isi, susunan, dan seluruh usaha pendidikan dan pengajaran.<sup>4</sup>

Hasil kerja Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran adalah rancangan undang-undang tentang pendidikan di Indonesia. Rancangan Undang-Undang tersebut kemudian ditetapkan menjadi undang-undang No. 4 Tahun 1950 tentang dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah.<sup>5</sup> Undang-undang pendidikan dan pengajaran mencakup segala hal mengenai pendidikan. Mulai dari bagian-bagian pendidikan, sistem pendidikan, kurikulum dan sistem persekolahan diatur dalam sebuah undang-undang

---

<sup>1</sup>Rochman Natawidjaja, *Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981), hlm. 93.

<sup>2</sup>Selanjutnya penulis akan menulis dengan PP dan K saja.

<sup>3</sup>Panitia Penyelidik Pengajaran RI yang beranggotakan 52 orang disahkan oleh Mr. Soewandi pada tanggal 12 Mei 1947. Lihat: Suradi, *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Indonesia. 1986), hlm. 23.

<sup>4</sup>I Djumhur, H. Danasuparta, *Sejarah Pendidikan*, (Bandung: Ilmu. 1961), hlm. 202.

<sup>5</sup>Soegarda Poerbakawatja, *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, (Jakarta: Gramedia, 1970), hlm. 52.

pendidikan. Begitu pula dengan Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran No. 4 tahun 1950. Bagian-bagian pendidikan yang diatur dalam UU tersebut antara lain; pendidikan agama, pendidikan intelektual dan pendidikan jasmani.<sup>6</sup>

Pendidikan jasmani diatur dalam bab V pasal 9 dalam Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran No. 4 tahun 1950. Pendidikan jasmani dinyatakan dapat menuju kepada keselarasan antara tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa, dan merupakan usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir batin.<sup>7</sup> Hal tersebut mendorong Kementerian PP dan K mengeluarkan kebijakan membuka sekolah guru untuk menghasilkan guru pendidikan jasmani. Kebijakan pemerintah tersebut diwujudkan dalam pendirian Sekolah Guru Pendidikan Djasmani (SGPD).<sup>8</sup>

SGPD Yogyakarta sebagai SGPD pertama di Indonesia sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Sekolah ini merupakan sekolah keguruan yang berbeda dari sekolah keguruan lainnya. SGPD Yogyakarta mempunyai sistem pendidikan dan pengajaran yang berbeda dari SGPD di kota lain. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik mengambil judul Perkembangan Sekolah Guru Pendidikan Djasmani (SGPD) di Yogyakarta 1950-1963. Judul tersebut dipilih karena SGPD merupakan sekolah pertama yang mendidik para guru untuk menjadi guru pendidikan jasmani yang profesional. Di sisi lain Yogyakarta dipilih karena merupakan tempat pertama dibukanya SGPD di Indonesia. Tahun 1950-1963 dipilih karena tahun 1950 merupakan tahun pertama dibukanya SGPD dan tahun 1963 merupakan tahun angkatan terakhir SGPD Yogyakarta.

#### **A. Kajian Pustaka**

Fokus penelitian ini adalah perkembangan sekolah guru pendidikan djasmani di Yogyakarta tahun 1950-1963. Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini membahas tentang latar belakang Pendidikan Jasmani di Indonesia. Buku yang digunakan untuk membahas rumusan masalah yang pertama penulis menggunakan buku karya H. J. S. Husdarta yang berjudul *Sejarah dan Filsafat Olahraga* diterbitkan oleh Alfabeta tahun 2010 di kota Bandung. Sumber lain yang digunakan adalah buku karya Moch. Soebroto yang berjudul *Asas-Asas Pengetahuan Umum Olahraga* diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Pengajar Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia tahun 1979 di kota Jakarta.

Rumusan masalah yang kedua dalam karya ini menjelaskan tentang sistem pendidikan sekolah guru pendidikan jasmani di Yogyakarta. Buku yang digunakan dalam bab ini adalah buku karya Siti Sutjiatiningsih yang berjudul *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta*, diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek inventarisasi dan Dokumentasi kebudayaan Daerah, terbit di kota Yogyakarta pada tahun 1980. Sumber lain yang digunakan dalam bab ini ialah buku karya Sumarsono

---

<sup>6</sup> Pendidikan jasmani dalam ejakan lama ditulis dengan menggunakan huruf d di depan j. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ejakan baru yakni pendidikan jasmani, tanpa menyertakan huruf d di depan j.

<sup>7</sup> Sumarsono Mestoko, *Pendidikan Di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 216.

<sup>8</sup> Untuk selanjutnya penulis akan menulis SGPD saja.

Mestoko yang berjudul *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di kota Jakarta, pada tahun 1979.

Rumusan masalah yang terakhir membahas tentang kegiatan pembelajaran di SGPD Yogyakarta. Buku yang digunakan dalam bab ini adalah buku karya Ratal Wiriasantosa yang berjudul *Supervisi Pendidikan Olahraga*, diterbitkan oleh Universitas Indonesia pada tahun 1984 di kota Jakarta. Sumber lain yang digunakan adalah buku karya Sumarsono Mestoko yang berjudul *Pendidikan di Indonesia dari Jaman Ke Jaman*, diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 1979 di Jakarta.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian sejarah yang digunakan penulis yaitu metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo. Penelitian sejarah mempunyai lima tahap. Kelima tahap tersebut yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, verifikasi, interpretasi dan penulisan.<sup>9</sup>

### **1. Pemilihan Topik**

Topik penelitian sejarah hendaknya dipilih berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual.<sup>10</sup> Kedekatan emosional dalam pemilihan tema sejarah pendidikan khusus SGPD adalah karena ketertarikan penulis terhadap dunia olahraga terutama basket. Kedekatan intelektual dalam pemilihan topik ini yaitu karena nantinya penulis juga akan menjadi seorang pendidik dan ketersediaan sumber yang ada. Pemilihan topik ini dilakukan agar penelitian lebih terfokus terhadap permasalahan yang akan dikaji. Karena sejarah terikat oleh ruang dan waktu sehingga dalam tahapan ini penulis membatasi waktu yakni antara rentang waktu 1950-1963. Sedangkan batasan ruang yang ditetapkan ialah di wilayah Yogyakarta. Yogyakarta merupakan tempat pertama dibukanya SGPD.

### **2. Heuristik**

Sumber dikelompokkan berdasarkan asal, kontain atau isi dan tujuannya. Sumber berdasarkan asal dikelompokkan lagi berdasarkan waktu produksi, tempat produksi, cara penulis memberikan informasi, dan posisi atau status penulis. Sumber berdasarkan cara penulis memberikan informasi dibagi menjadi dua yaitu sumber sejaman atau primer dan sumber sekunder.<sup>11</sup>

Sumber primer dalam penelitian ini adalah ijazah, wawancara, arsip catatan statistik, dan pengumuman penerimaan siswa baru. Sumber sekunder yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini berupa buku-buku yang menjadi acuan penelitian.

### **3. Verifikasi**

Kritik sumber bertujuan untuk menguji kelayakan sumber-sumber yang didapatkan dalam tahapan heruistik, dapat digunakan atau tidak dalam penelitian sejarah. Terdapat

---

<sup>9</sup> Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang Budaya. 2001. hlm 89.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 73

dua macam kritik sumber yang harus dilakukan, yaitu eksternal dan internal. Kritik eksternal dilakukan untuk menguji keaslian sumber. Kritik eksternal meliputi kritik terhadap jenis kertas, ukuran, bahan, tinta, jenis tulisan.<sup>12</sup> Penulis menilai sumber primer yang didapatkan sudah bisa dipercaya keasliannya setelah melalui proses kritik ekstern tersebut.

Kritik internal dilakukan untuk menguji kredibilitas atau kebenaran sumber. Aspek utama yang diperhatikan dalam kritik internal adalah konten atau isi sebuah sumber. Kritik internal meliputi latar belakang penulis menulis topik tersebut, dan dibutuhkan pula pemahaman mendalam tentang isi sumber. Kritik internal juga dapat dilakukan dengan cara membandingkan sumber yang sudah didapat dengan sumber lain yang relevan. Penulis melakukan kritik internal terhadap seluruh sumber yang didapat. Hasilnya penulis belum menemukan kesalahan maupun informasi yang kurang dapat dipercaya.

#### **4. Interpretasi**

Interpretasi dilakukan karena fakta-fakta sejarah masih terpisah-pisah. Interpretasi memiliki dua macam yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti penulis harus menguraikan sumber-sumber yang ada. Sementara sintesis berarti penulis harus menyatukan sumber-sumber yang telah di dapat sebelumnya. Penulis menggunakan metode analisis dan sintesis. Analisis digunakan untuk menjabarkan perkembangan SGPD Yogyakarta yang terdapat dalam arsip. Penulis mendasari analisis tersebut berdasarkan hasil sintesis dari sumber-sumber yang telah ditemukan.

#### **5. Historiografi**

Historiografi atau penulisan sejarah merupakan tahap terakhir dalam penelitian sejarah. Historiografi merupakan penyampaian sintesa dalam bentuk karya sejarah atas penelitian yang telah dilakukan menurut kaidah-kaidah yang telah ditentukan.<sup>13</sup> Penulisan sejarah dituntut harus kronologis sesuai dengan urutan waktu.<sup>14</sup> Penyajian penelitian ini untuk mengetahui Sekolah Guru Pendidikan Djasmani di Yogyakarta 1950-1963.

### **II. Pembahasan**

#### **A. Pendidikan Jasmani pada Masa Kolonial sampai Kemerdekaan Indonesia**

##### **1. Pendidikan Jasmani pada Masa Kolonial**

Tahun 1602 merupakan tahun berdirinya kongsi dagang *Verenigde Oost Indische Compagnie*<sup>15</sup> di Batavia (sekarang Jakarta). Kegiatan dan pendidikan yang berbentuk pendidikan jasmani tidak secara pasti dapat diketahui pada masa ini. Pendidikan yang sebenarnya baru muncul setelah wilayah Nusantara dikuasai Belanda dengan gaya

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 101.

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 100-101.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 104.

<sup>15</sup>Selanjutnya akan ditulis VOC saja.

penjajahan baru.<sup>16</sup> Penjajahan ini berlangsung dari tahun 1830-1900-an. Masyarakat pribumi baru mendapatkan kesempatan pendidikan mulai tahun 1901. Tahun tersebut pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai menerapkan politik etis<sup>17</sup>. Sekolah yang didirikan pada masa awal diberlakukannya politik etis merupakan sekolah yang diperuntukkan untuk anak-anak keturunan Belanda.

Kurikulum pendidikan di masa tersebut tidak ada mata pelajaran yang melibatkan badan siswa. Mata pelajaran yang melibatkan badan siswa yakni gerak badan (pendidikan jasmani). Tidak adanya mata pelajaran seperti itu dikarenakan pendidikan saat itu bertujuan untuk memenuhi pegawai-pegawai yang dibutuhkan oleh pemerintah kolonial.<sup>18</sup> Mata pelajaran pendidikan jasmani juga belum ditemukan di kurikulum Sekolah Guru (*Kweekschool*).

Mata pelajaran yang melibatkan badan siswa tidak dimasukkan ke dalam kurikulum tahun 1892 dan 1912. Barulah pada tahun 1918 disediakan biaya f. 20.000,- untuk pendidikan jasmani di *Kweekschool*, dengan tujuan agar dapat diberikan di Sekolah Kelas Dua.<sup>19</sup> Mata pelajaran pendidikan jasmani kenyataannya tidak diberikan untuk siswa yang bersekolah di *Kweekschool* tingkat rendah. Pendidikan jasmani justru diperuntukkan untuk Sekolah Guru *Normaalschool*<sup>20</sup> yang lama pendidikannya 4 tahun.<sup>21</sup>

Tahun 1918 menurut peraturan kurikulum sekolah *Europese Lagere School* (ELS)<sup>22</sup>, kurikulum di sekolah tersebut dapat diperluas. Salah satu perluasannya dengan menambahkan mata pelajaran pendidikan jasmani. Masuknya pendidikan jasmani ke dalam kurikulum ELS, bukan berarti di sekolah lanjutan ELS pendidikan jasmani juga diajarkan. Buktinya pada *Meer Uitgebreid Large Onderwijs* (MULO) dan *Hogere Burger School* (HBS) tidak menyertakan mata pelajaran pendidikan jasmani di dalamnya. Pendidikan jasmani mulai muncul pada jenjang sekolah menengah sejak dibukanya

---

<sup>16</sup>Penjajahan gaya baru adalah keinginan pihak Belanda untuk mengeksploitasi dan menguasai seluruh pulau ini (Jawa), Lihat: M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: Serambi, 2005), hlm. 259.

<sup>17</sup>Politik Etis terdiri atas tiga bidang yakni, Irigasi, transmigrasi dan pendidikan. Lihat: W. Poespoprodjo, *Jejak-jejak Sejarah 1908-1926 Terbentuknya Suatu Pola*, (Bandung: Remadja Karya, 1986), hlm. 11.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 29.

<sup>19</sup>S. Nasution, *op. cit.*, hlm. 65.

<sup>20</sup>*Normaalschool* merupakan jenis pendidikan sekolah guru yang lebih tinggi dari *Kweekschool*. Buchori menyebutkan bahwa *Normaalschool* biasanya digunakan untuk mencapai *hoofdacte* (Akta Guru Kepala). Lihat: Mochtar Buchori, *Evolusi Pendidikan di Indonesia Dari Kweekschool sampai Ke IKIP 1852-1998*, (Yogyakarta, INSISTPress, 2007), hlm. 16.

<sup>21</sup>Mata pelajaran pada jenjang *Normaalschool* ada empat belas mata pelajaran antara lain: bahasa daerah, bahasa Melayu, ilmu mendidik, ilmu hitung, ilmu bangun, ilmu tanam-tanaman, ilmu hewan, ilmu alam, ilmu bumi, sejarah, menggambar, menyanyi, pendidikan jasmani dan permainan di luar sekolah. Lihat: *Ibid.*

<sup>22</sup>Selanjutnya akan ditulis ELS saja.

*Algemene Middelbare School* (AMS). Kurikulum sekolah AMS terdiri dari mata pelajaran umum dan khusus, pendidikan jasmani masuk ke dalam mata pelajaran umum.<sup>23</sup>

Bentuk pendidikan jasmani yang diberikan di sekolah-sekolah pada masa kolonial berbentuk permainan (*game*). Bentuk permainan yang berkembang seperti, sepak bola, basket kasti, bola tangan, atletik dan senam.<sup>24</sup> Bentuk permainan bertujuan untuk meningkatkan kepekaan sosial siswa, karena biasanya permainan dalam pendidikan jasmani bersifat kelompok.

Masa pendudukan Jepang di Indonesia pendidikan jasmani masih diajarkan di dalam pendidikan formal di sekolah. Tujuan pendidikan jasmani pada masa ini adalah untuk membentuk manusia yang setia kepada Jepang dan memiliki kemampuan berperang.<sup>25</sup> Hal ini dibuktikan melalui pendidikan jasmani yang diajarkan pada masa penjajahan Jepang murid-murid saat itu diajarkan untuk baris berbaris. Bentuk-bentuk pendidikan jasmani lainnya pada masa ini adalah *Kyoreng*, *Kendo* (bela diri), *Tasio* (senam) dan ketrampilan menggunakan *bayonet*.<sup>26</sup>

## **2. Pendidikan Jasmani pada masa awal Kemerdekaan Indonesia (1945-1949)**

Istilah pendidikan jasmani sebelum tahun 1950 disebut dengan istilah gerak badan atau *sport*<sup>27</sup> Pendidikan jasmani merupakan bagian dari kurikulum pada sebagian jenjang sekolah di Indonesia dari masa kolonial. Mata pelajaran tersebut diajarkan pada sekolah rendah dan sekolah menengah. Memasuki masa awal kemerdekaan Indonesia, pendidikan jasmani masih menjadi bagian dari pendidikan di Indonesia. Masuknya pendidikan jasmani menjadi bagian pendidikan di Indonesia disebabkan beberapa hal. Pertama pada masa awal kemerdekaan Indonesia Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dipegang oleh Ki Hadjar Dewantara<sup>28</sup> sehingga unsur-unsur pendidikan yang diterapkan merupakan buah dari pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Kedua pendidikan di Indonesia awal kemerdekaan mengadopsi dari pendidikan kolonial.<sup>29</sup> Indonesia banyak

---

<sup>23</sup>S. Nasution, *op.cit.*, hlm. 138.

<sup>24</sup>Margono, *op. cit.*, hlm. 44-45.

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>*Bayonet* merupakan senjata tajam yang biasanya dipasangkan pada ujung senapan. Hal ini juga berguna dalam keterampilan berperang. Lihat: *Ibid.*

<sup>27</sup>Penggunaan istilah *sport* karena belum adanya pengertian khusus dari kata tersebut. Lihat: Sumarsono Mestoko, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 16.

<sup>28</sup>Sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama di Indonesia tentunya ide-ide Ki Hadjar Dewantara menjadi berpengaruh bagi pendidikan di Indonesia. Ide tentang usur pendidikan yakni pendidikan agama, pendidikan intelektual dan pendidikan jasmani menjadi landasar penting bagi pendidikan di Indonesia. Lihat: Munar S. Hamidjojo, *Kurusus Guru*, (Medan: Islamiyah, [tanpa tahun]), hlm. 8-9.

<sup>29</sup>Hal ini dibuktikan dengan adanya mata pelajaran pendidikan jasmani dalam kurikulum sekolah rendah ELS ketika masa pemerintahan kolonial Hindia-Belanda.

mengadopsi pendidikan kolonial seperti sistem pendidikan dan kurikulum atau mata pelajaran yang diajarkan. Bedanya hanya terdapat pada tujuan dan dasar pendidikan yang dianut.

Mata pelajaran ini tidak lagi hanya menjadi mata pelajaran di sekolah rendah saja. Pendidikan jasmani pada masa kemerdekaan Indonesia menjadi bagian dari mata pelajaran yang diajarkan mulai dari tingkat sekolah dasar atau sekolah rakyat (SR)<sup>30</sup> hingga sekolah lanjutan.

Pendidikan jasmani dimasukkan ke dalam kurikulum awal kemerdekaan diharapkan mampu membantu penumbuhan fisik dan jiwa yang baik dari para pemudanya. Termuatnya pendidikan jasmani dalam kurikulum menandakan bahwa waktu itu pemerintah telah berpandangan maju dan berkemauan baik dalam menyeimbangkan pendidikan yang ada.<sup>31</sup> Penyeimbangan pendidikan yang dimaksud adalah karena gerak badan yang ada saat itu menggunakan sistem permainan.

### **3. Masalah-masalah Pendidikan Jasmani dari masa Kolonial hingga Kemerdekaan Indonesia**

Dibukanya pendidikan secara luas untuk masyarakat Indonesia bukan tanpa tujuan. Tujuannya adalah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan tanah air.<sup>32</sup> Pembukaan pendidikan seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia di imbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Mutu pendidikan menyangkut isi pendidikan termasuk kurikulum. Kurikulum sebagai rencana dan pengatur tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari siswa dalam menumpuh pendidikan di lembaga pendidikan tertentu. Kurikulum biasanya harus sesuai dengan keadaan jaman.

Tujuan pendidikan yang diselenggarakan harus didasarkan atas kebangsaan Indonesia dalam arti luas.<sup>33</sup> Sayangnya, tujuan pendidikan pada masa awal kemerdekaan belum memiliki landasan berupa undang-undang. Belum adanya landasan tentang undang-undang pendidikan menyebabkan kurikulum pendidikannya hanya diorientasikan pada kebutuhan bangsa yang merdeka. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang hanya berorientasi pada kepentingan kolonial.

Belum adanya landasan pendidikan awal kemerdekaan menyebabkan banyaknya permasalahan dalam pelaksanaan pendidikan. Salah satu contohnya adalah permasalahan pendidikan jasmani. Pelaksanaan pendidikan jasmani yang sebelum tahun

---

<sup>30</sup>Kurikulum SR tahun 1947 terdiri dari 16 mata pelajaran, yaitu: Bahasa Indonesia, bahasa daerah, berhitung, ilmu alam, ilmu hayat, ilmu bumi, sejarah, menggambar, menulis, seni suata, pekerjaan tangan, seni suata, kebersihan dan kesehatan, budi pekerti, agama dan gerak badan. Lihat: Redja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 384.

<sup>31</sup>Pandangan pemerintah yang berfikir maju untuk menyeimbangkan pendidikan yang ada saat itu dipengaruhi oleh gagasan Ki Hadjar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Ki Hadjar menyebutkan bahwa ada tiga unsur penting dalam pendidikan yakni pendidikan agama, pendidikan intelektual dan gerak badan (pendidikan jasmani). Lihat: *Ibid.*, hlm. 300.

<sup>32</sup>Redja Mudyahardjo, *op. cit.*, hlm. 371.

<sup>33</sup>Willy Toisuta, dkk, *Ilmu Keguruan Pendidikan Nasional untuk SPG*, (Jakarta: Depdikbud, [Tanpa Tahun]), hlm 80.

1950 disebut dengan gerak badan<sup>34</sup> memiliki berbagai permasalahan. Permasalahan yang dihadapi disekolah antara lain; (1) pendidikan jasmani untuk anak perempuan, (2) perlunya nasihat dokter, (3) bahan pengajaran diambil dari permainan dan kesenian nasional, (4) perlunya musik, (5) kependuan, (6) pencegahan ekses dalam perlombaan serta perlunya membiayai kegiatan, (7) perlunya menolong sekolah partikelir, (8) perlunya lapangan disetiap sekolah, dan (9) perlunya mengadakan kursus kilat bagi guru-guru.<sup>35</sup>

## **B. Latar Belakang Berdirinya SGPD dan Sistem Pendidikan SGPD Yogyakarta 1950-1963**

### **1. Latar Belakang Berdirinya SGPD di Yogyakarta Tahun 1950**

Rancangan undang-undang<sup>36</sup> tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran diresmikan pada tahun 1950. RUU tersebut setelah diresmikan bernama undang-undang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran. Pemerintah Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang No. 4 Tahun 1950 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah. Undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran lahir pada 1950.<sup>37</sup>

Isi Undang-undang tersebut adalah rencana pembelajaran 1950 yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia yang beribukota di Yogyakarta saat itu.<sup>38</sup> Undang-undang tersebut terdiri dari 17 Bab dan 30 pasal. Mulai dari Aturan umum, tujuan pendidikan dan pengajaran, dasar-dasar pendidikan dan pengajaran, jenis-jenis pendidikan dan pengajaran terdapat dalam undang-undang tersebut.

Pendidikan jasmani juga ikut masuk dalam undang-undang no. 4 tahun 1950. Hal ini menandakan bahwa pemerintah telah memperhatikan perkembangan pendidikan jasmani di negara ini. Pendidikan jasmani tercantum pada Bab IV pasal 9.<sup>39</sup> Adanya pasal yang menjelaskan pendidikan jasmani menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya tentang pendidikan intelektual saja.

---

<sup>34</sup> Tahun 1945-1950 pendidikan jasmani di Indonesia disebut dengan gerak badan atau *sport*, tahun 1950-1961 disebut dengan istilah pendidikan jasmani, tahun 1961-1966 disebut dengan olahraga, Lihat: H.J.S Husdarta, *op.cit.*, hlm. 55-63.

<sup>35</sup> Soegarda, *op.cit.*, hlm. 37.

<sup>36</sup> Selanjutnya akan ditulis RUU saja.

<sup>37</sup> Hasil dari Undang-undang ini adalah rencana pembelajaran 1950. Rencana pembelajaran masih sama dengan rencana pembelajaran tahun 1947, yakni masih dengan mata pelajaran yang terpisah-pisah. Lihat: A. Ahmadi, *Pendidikan dari Masa ke Masa*, (Bandung: Arimco, 1987), hlm. 76.

<sup>38</sup> Setelah NKRI dibentuk, maka Undang-Undang Pendidikan Pengajaran tersebut diterima oleh DPR pada tanggal 27 Januari 1954 dan disahkan oleh pemerintah tanggal 12 Maret 1954 dan akhirnya diundangkan pada tanggal 18 Maret 1954. Kemudian UU ini berlaku untuk seluruh wilayah negara kesatuan RI yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1950. Lihat: Redja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 371.

<sup>39</sup> Sumarsono Mestoko, *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979), hlm. 216.

Sebelum munculnya undang-undang pendidikan dan pengajaran tahun 1950, sebenarnya di dalam pendidikan yang ada saat itu telah memasukkan pendidikan jasmani di dalam kurikulumnya. Permasalahannya sebelum tahun 1950 belum ada sekolah pendidikan guru khusus pendidikan jasmani.

Tidak adanya sekolah yang khusus mendidik calon guru pendidikan jasmani menyebabkan guru pendidikan jasmani saat itu kurang profesional. Untuk menyetak guru pendidikan jasmani yang profesional dan melaksanakan tujuan pendidikan jamani, maka dibukalah sekolahan guru pendidikan jasmani. Melalui keputusan Menteri P P dan K pada bulan Agustus 1950 dibuka sebuah Sekolah Guru Pendidikan Djasmani (SGPD) di Yogyakarta.<sup>40</sup> Bertempat di Yogyakarta karena pada tahun 1950 pemerintahan Republik Indonesia berpusat di Yogyakarta. Tepatnya sekolah ini beralamat di Jalan Bantul No. 50 Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta.<sup>41</sup> SGPD merupakan sekolah yang memiliki lama belajar yakni 4 tahun.

## 2. Sistem Pendidikan SGPD Yogyakarta

Sistem pendidikan merupakan keseluruhan dari bagian-bagian pendidikan yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari beberapa bagian, yaitu: tujuan pendidikan, murid, guru (pendidik), kurikulum pendidikan, sarana prasarana dan jenjang pendidikan.<sup>42</sup>

### a. Guru

Syarat menjadi guru di SGPD Yogyakarta adalah sekurang-kurangnya telah mengenyam pendidikan B1<sup>43</sup>. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Edi Sumardi yang menyatakan bahwa dirinya melanjutkan B1 untuk menjadi guru di SGPD Yogyakarta. Selanjutnya Edi mengajar di SGPD Yogyakarta pada tahun 1956.

Jumlah guru SGPD Yogyakarta pada tahun pertama hanya berkisar 13 orang saja. Hal ini disebabkan karena tahun pertama pembukaan SGPD Yogyakarta baik sekolah maupun asramanya bersifat darurat, akibatnya jumlah guru pada tahun awal pembukaan SGPD jumlahnya sedikit.

Sembilan tahun setelah pembukaannya, jumlah guru SGPD Yogyakarta meningkat. Jumlah gurunya mencapai 45 orang.<sup>44</sup> Guru-guru tersebut terhitung

---

<sup>40</sup>Sri Sutjiatiningsih, *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Yogyakarta: Daerah Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1980) hlm. 138.

<sup>41</sup>SGPD Yogyakarta dulu sering disebut dengan SGPD Suryaden, karena wilayah Gedongkiwo dulu bernama Suryaden.

<sup>42</sup>Ellyza Roose dan Soewadji Lazarut, *Pedagogik dan Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, [tanpa tahun terbit]), hlm. 118.

<sup>43</sup>B 1 merupakan jenjang pendidikan seperti kursus, lama belajar B 1 adalah selama 1 tahun. Lulusan SGA dan SGPD dapat meneruskan pendidikan di B 1 ini.

<sup>44</sup>Biro Statistik dan Perancangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, *Statistik Pemerintah Istimewa Jogjakarta*, (Jogjakarta: Biro Statistik dan Perancangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta, 1961), hlm. 44.

mengajar pada tahun pelajaran 1959 sampai dengan 1960. Jumlah guru laki-laki ada 37 orang dan jumlah guru perempuan ada 8 orang. Tahun 1961 hingga tahun 1962 jumlah guru hanya bertambah 2 orang yakni menjadi 37 guru. Jumlah guru SGPD Yogyakarta dari tahun ajaran 1960 hingga 1962

Jumlah guru SGPD Yogyakarta dari tahun ke tahun mengalami penurunan dan penambahan. Mulai tahun 1950 yang mulanya hanya terdapat 13 guru kemudian bertambah menjadi 28 guru di tahun 1951. Tahun ketiga SGPD Yogyakarta berdiri jumlah gurunya masih terus bertambah yakni menjadi 37 guru baik guru tetap maupun tidak tetap.

Jumlah guru pada tahun 1954-1958 tidak dapat diketahui. Hal ini disebabkan keterbatasan informasi yang penulis dapatkan. Tahun-tahun terakhir SGPD Yogyakarta jumlah gurunya justru menurun. Hal ini dibuktikan antara tahun 1959-1963 jumlah gurunya terus menurun sebanyak 2 orang. Penurunan tersebut dimungkinkan karena SGPD Yogyakarta memasuki tahun-tahun terakhir, sehingga jumlah gurunya menurun.

#### **b. Murid**

Tahun pertama pembukaan SGPD Yogyakarta, untuk menjadi murid harus memenuhi berbagai persyaratan. Persyaratan tersebut telah ditetapkan oleh pemerintah melalui surat putusan menteri P.P.K. tertanggal 17-5-1950 no. 3554/B hal Peraturan tentang Sekolah Guru Pendidikan Djasmani Negeri fasal III.<sup>45</sup> Dilihat dari waktu surat yang tertera pada surat keputusan Menteri P.P.K di atas, menunjukkan bahwa syarat-syarat tersebut berlaku mulai dari tahun 1950-1953. Berlakunya surat keputusan tersebut merupakan syarat awal proses penerimaan murid baru untuk sekolah SGPD baik di Jogjakarta maupun di Bandung.

Pengumuman pada tahun 1955 berbeda dari tahun 1953, meskipun setiap tahunnya sekolah ini menerima murid baru. Tahun ini pembukaan penerimaan muridnya dimulai dari tanggal 1 Juni dan berakhir pada tanggal 17 Juli 1955.<sup>46</sup> Perbedaan dari pengumuman pada tahun 1953 dan 1955 terdapat pada penerimaan murid baru. Tahun 1953 SGPD menerima murid kelas II, III dan IV. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut SGPD baru tahun ke 3 setelah pembukaannya, sehingga dibuka pula untuk penerimaan murid baru untuk yang kelas II, III dan IV.

Tahun 1956 merupakan tahun ke enam bagi sekolah yang akan menghasilkan calon guru pendidikan jasmani ini. Persyaratan untuk menjadi murid di SGPD tahun 1956 tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Pengumuman penerimaan murid baru diumumkan melalui pengumuman No. 202/PDP/B-'56.tgl. 29 Maret 1956. Pada tahun ini pendaftaran murid baru untuk SGPD di Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Medan dan Makasar dimulai tanggal 1 Juni hingga 17 Juli 1956.<sup>47</sup>

Biaya sekolah SGPD Yogyakarta yang berasal dari pemerintah. Hal ini menyebabkan murid tidak perlu mengeluarkan biaya pendidikan lagi. Pemerintah justru memberikan uang sekolah (semacam beasiswa) untuk murid SGPD. Uang sekolah tersebut digunakan untuk membayar sekolah seperti biaya asrama dan biaya proses

---

<sup>45</sup> Inspeksi Pusat Pendidikan Djasmani, (1953), Penerimaan Murid baru untuk SGPD, *Sekolah Lanjutan Kita*, (Jakarta: Kementrian P.P.K, Tahun ke III), hlm. 26.

<sup>46</sup> Pengumuman, No. 070/PDP/B-55 tgl. 31/3-55. *Sekolah Lanjutan Kita*, Tahun Ke IV.

<sup>47</sup> Inspeksi Pusat Pendidikan Djasmani, (1956, Pengumuman No. 202/PDP/B-'56.tgl. 29 Maret 1956. *Sekolah Lanjutan Kita*, Tahun Ke V.

belajar mengajar. Jumlah murid di SGPD Yogyakarta dari tahun ketahun menunjukkan jumlah yang berbeda-beda. Tahun awal pembukaannya jumlah murid mengalami kenaikan, namun diakhir penutupannya jumlah murid SGPD Yogyakarta sempat mengalami penurunan.

### **3. Sarana Prasarana**

SGPD Yogyakarta memiliki sarana pendidikan yang cukup lengkap. Sarana tersebut mulai dari Gedung sekolah SGPD Yogyakarta yang beralamat di Jalan Bantul No. 50 Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta. Gedung sekolah SGPD Yogyakarta sekarang menjadi kampus III Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Selain sarana di dalam sebuah ruangan SGPD Yogyakarta juga mempunyai sarana yang menunjang proses pendidikan lainnya seperti lapangan. Lapangan yang terdapat di lingkungan sekolah SGPD adalah lapangan bola voli dan basket. Ada pula pendopo yang digunakan secara khusus sebagai tempat proses pembelajaran senam.

Sarana prasarana yang berupa lapangan untuk praktek terdiri dari Lapangan Bola Voli, Lapangan Basket, Lapangan Sepak Bola, dan Kolam renang. Lapangan Bola Voli di lingkungan sekolah hanya ada lapangan kecil.

Kegiatan praktek olahraga seperti sepak bola menggunakan lapangan yang berada di wilayah Minggiran Yogyakarta. Akses untuk menuju lapangan Minggiran murid SGPD diwajibkan untuk berbaris ataupun gerak jalan menuju lapangan Minggiran. Hal ini digunakan agar murid mampu melatih diri untuk disiplin. Kegiatan praktek berenang bertempat di kolam renang Umbang Tirto. Kolam renang Umbang Tirto berada dikawasan Lapangan Kridosono Yogyakarta. Transportasi yang digunakan untuk menuju kolam renang biasanya menggunakan sepeda.

Alat penunjang olahraga lainnya seperti peralatan untuk senam, baik senam irama maupun senam perlombaan di SGPD Yogyakarta termasuk yang terlengkap. Mulai dari, matras, tongkat, seragam, musik dan sebagainya disediakan oleh sekolah. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Edi Sumardi yang menyatakan bahwa perlengkapan penunjang pendidikan di SGPD Yogyakarta yang terlengkap adalah perlengkapan senam.

### **4. Kurikulum**

SGPD Yogyakarta mulai dibuka pada tahun 1950. Kurikulum yang digunakan untuk proses belajar mengajar menggunakan rencana pelajaran 1950. Awal kemerdekaan Indonesia kurikulum hanya susunan tentang mata pelajaran yang diajarkan di suatu sekolah. Kurikulum di SGPD juga hanya tersusun dari beberapa mata pelajaran yang diajarkan di sekolah tersebut. Hal ini berbeda dengan kurikulum pada masa sekarang yang mengatur tentang sistem pendidikan secara utuh. Kurikulum tahun 1950 menetapkan SGPD Yogyakarta sebagai sekolah dengan waktu lama belajar empat tahun.<sup>48</sup>

Mata pelajaran di SGPD Yogyakarta terdiri dari dua bagian yakni, mata pelajaran pendidikan jasmani dan mata pelajaran pengetahuan umum. Tentu sebagai sekolah yang berlatar belakang pendidikan jasmani kurikulum sekolah ini banyak mengandung mata pelajaran pendidikan jasmani dan ilmu mendidik.

### **C. Kegiatan Belajar Mengajar di SGPD Yogyakarta 1950-1963**

#### **1. Kegiatan Belajar Mengajar di SGPD Yogyakarta**

Kegiatan proses belajar mengajar tahun ajaran baru di SGPD Yogyakarta dilaksanakan pada bulan Agustus. Sebelumnya pada bulan Juni hingga Juli telah dilaksanakan

---

<sup>48</sup>Sri Sutjiatiningsih, *op.cit.*, hlm. 138.

pendaftaran untuk murid baru di SGPD Yogyakarta. Proses pendaftaran murid baru berlangsung kurang lebih selama tujuh minggu. Model pendidikan di SGPD Yogyakarta meniru model pendidikan di Taman Siswa, yakni *peguron*.<sup>49</sup> Berbeda dengan Taman siswa yang menggunakan sistem *peguron* dengan memisahkan pendidikan untuk kaum perempuan dan kaum laki-laki. SGPD Yogyakarta justru menggabungkan kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam satu asrama dan satu sekolah. Penggabungan tersebut menjadi ciri khas dari model pendidikan di SGPD Yogyakarta bernama *coeducation*.<sup>50</sup> Hal ini berpengaruh pada kegiatan belajar mengajar di SGPD Yogyakarta yang terjadi di dalam dua tempat, yakni di kelas dan di asrama.

#### **a. Kegiatan Belajar Mengajar di Kelas**

Proses belajar mengajar di kelas SGPD Yogyakarta berlangsung dari hari Senin hingga hari Sabtu. Proses belajar mengajar dalam satu hari dibagi menjadi dua waktu. Waktu pertama yakni di pagi hari mulai dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB. Waktu kedua yakni pada sore hari pukul 15.00-17.30 WIB. Hal ini diperkuat oleh Edi Sumardi yang menyatakan bahwa kegiatan belajar mengajar di SGPD berlangsung selama dua kali dalam sehari yakni pagi dan sore hari.

Proses belajar mengajar di SGPD Yogyakarta terdiri dari dua macam, yakni teori dan praktek. Kegiatan belajar mengajar berupa teori dilaksanakan di dalam kelas. Waktu proses ini tidak hanya berlangsung di pagi atau siang hari saja, terkadang juga berlangsung di sore hari. Kegiatan belajar mengajar berupa praktek dilakukan di luar kelas atau lapangan sesuai dengan kegiatan prakteknya. Sama halnya dengan proses belajar mengajar teori, proses belajar mengajar praktek juga berlangsung dalam dua waktu yakni pagi dan sore hari.

#### **b. Kegiatan Belajar Mengajar di Asrama**

Proses pembelajaran di SGPD tidak berhenti di dalam kelas saja. murid SGPD masih diberikan bekal ilmu di asrama. Proses pembelajaran di asrama ini mengadopsi proses pembelajaran seperti di Taman Siswa. Hanya saja guru yang ada di SGPD tidak semua tinggal di asrama. Hanya guru pengurus asrama saja yang tinggal di asrama.

Saat di asrama mereka mendapat bekal ilmu berorganisasi dan berlatih pendidikan jasmani sesuai dengan *hobby* masing-masing murid. Pernyataan tersebut dipertegas oleh Rachmat yang menyatakan bahwa kegiatan di asrama diselenggarakan sesuai dengan koordinasi yang diberikan oleh ketua asrama.

## **2. Penilaian dan Evaluasi Belajar**

Kegiatan penilaian dan Evaluasi belajar di SGPD Yogyakarta dilakukan setiap 4 bulan sekali.<sup>51</sup> Setiap empat bulan sekali diadakan tes untuk mengetahui hasil belajar murid-murid SGPD Yogyakarta. Penilaian dan evaluasi belajar teori dilakukan dengan cara tertulis sesuai waktu yang telah ditentukan dari sekolah. Berbeda dengan penilaian dan evaluasi praktek dilakukan tidak terjadwal. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Edi

---

<sup>49</sup>Sistem *peguron*, merupakan sistem pendidikan asrama atau murid dan guru tinggal dalam satu lingkungan tempat tinggal.

<sup>50</sup>Wawancara dengan Edi Sumardi alumni peserta didik di SGPD Yogyakarta tahun 1952 yang menjadi guru di SGPD Yogyakarta tahun 1956-1959. Wawancara bertempat di SMP 4 Magelang Jl. Pahlawan, pada 1 Juli 2016, pukul 15:40.

<sup>51</sup>Periode empat bulan ini dinamakan dengan istilah caturwulan.

Sumardi yang menyatakan bahwa proses penilaian dan evaluasi praktek dilakukan secara individu. Murid yang sudah siap dan mampu untuk ujian praktek dapat ujian di waktu awal meskipun tidak sesuai jadwal ujian.

### **3. Prestasi SGPD Yogyakarta**

Berkaitan dengan pendidikan jasmani setiap tahunnya pemerintah Indonesia yang diwakili oleh departemen PP dan K selalu mengadakan perlombaan-perlombaan pendidikan jasmani yang diselenggarakan oleh Persatuan Atletik Seluruh Indonesia<sup>52</sup>. Perlombaan ini ditujukan untuk sekolah menengah lanjutan atas yang sederajat. Tahun 1952 SGPD Yogyakarta mengikuti perlombaan PASI tersebut. Hasil prestasi tahun 1952 tersebut murid SGPD berhasil merebut beberapa kemenangan di dalam perlombaan yang di lombakan seperti, lompat jauh dan perlombaan perorangan.

### **III. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pendidikan jasmani mulai masuk ke dalam pendidikan formal di mulai tahun 1918. Tahun 1981 disediakan biaya f. 20.000,- untuk pendidikan jasmani di *Kweekschool*. Tahun-tahun selanjutnya pendidikan jasmani mulai masuk di ELS, HIS, MULO, HBS dan AMS sebagai mata pelajaran tambahan di sekolah. Bentuk pendidikan jasmani yang diberikan di sekolah-sekolah pada masa kolonial berbentuk permainan (*game*). Bentuk permainan yang berkembang seperti, sepak bola, basket kasti, bola tangan, atletik dan senam. Hal ini bertujuan untuk membentuk kepekaan sosial pada diri murid.

Masuknya pendidikan jasmani menjadi bagian pendidikan di sekolah didasari dari diberlakukannya Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran No. 4 tahun 1950. Pendidikan jasmani diatur dalam bab V pasal 9 dalam Undang-Undang Pendidikan dan Pengajaran No. 4 tahun 1950. Pendidikan jasmani dinyatakan dapat menuju kepada keselarasan antara tumbuhnya badan dan perkembangan jiwa, dan merupakan usaha untuk membuat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang sehat dan kuat lahir batin. Pernyataan tersebut manandakan bahwa pendidikan jasmani mampu mendorong kecerdasan otak disetiap manusia.

Kegiatan belajar mengajar di SGPD Yogyakarta berlangsung di dalam dua tempat yakni di sekolah (kelas) dan di asrama. Pembelajaran di dalam kelas terdiri dari kegiatan pembelajaran praktek dan teori. Sedangkan pembelajaran di asrama murid di SGPD diajarkan untuk berorganisasi mengurus asrama.

### **Daftar Pustaka**

#### **Arsip:**

- [1]. Catatan Biro Statistik dan Perancangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, (1961), *Statistik Pemerintah Istimewa Jogjakarta*, Jogjakarta: Biro Statistik dan Perancangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta.

#### **Wawancara:**

- [1]. Edi Sumardi, alumni pesrta didik di SGPD Yogyakarta tahun 1952 yang menjadi guru di SGPD Yogyakarta tahun 1956-1959, 83 tahun, Wiraswasta.

#### **Buku:**

- [1]. Ahmadi, (1987), *Pendidikan dari Masa ke Masa*, Bandung: Arimco.

---

<sup>52</sup>Selanjutnya ditulis PASI.

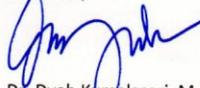
- [2]. Ary H. Gunawan, (1986), *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara.
- [3]. Biro Statistik dan Perancangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, (1961), *Statistik Pemerintah Istimewa Jogjakarta*, Jogjakarta: Biro Statistik dan Perancangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Jogjakarta.
- [4]. Ellyza Roose dan Soewadji Lazarut, ([tanpa tahun terbit]), *Pedagogik dan Pendidikan Nasional*, Jakarta: Direktorat Pendidikan Guru dan Tenaga Teknis. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- [5]. I Djumhur, H. Danasuparta, (1961), *Sejarah Pendidikan*, Bandung: Ilmu.
- [6]. Jurusan Pendidikan Sejarah UNY, (2013), *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah FIS UNY*.
- [7]. Kuntowijoyo. (2001), *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya.
- [8]. M. C. Ricklefs, (2005), *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi.
- [9]. Mochtar Buchori, (2007), *Evolusi Pendidikan di Indonesia Dari Kweekschool sampai Ke IKIP 1852-1998*, Yogyakarta, INSISTPress.
- [10]. Munar S. Hamidjojo, ([tanpa tahun]), *Kurusus Guru*, Medan: Islamiyah.
- [11]. Nugroho Notosusanto, (1984), *Sejarah Nasioanl Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- [12]. Redja Mudyaharjo, (2010), *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- [13]. Sri Sutjatiningsih, (1980), *Sejarah Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Daerah Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- [14]. Soegarda Poerbakawatja, (1970), *Pendidikan dalam Alam Indonesia Merdeka*, Jakarta: Gramedia.

- [15]. Sumarsono Mestoko, (1979), *Pendidikan Di Indonesia dari Jaman ke Jaman,,* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- [16]. Sumarsono Mestoko, (1979), *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman,* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
- [17]. Sumarsono Mestoko, (1979), *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman,* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- [18]. Suradi, (1986), *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan,* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional Indonesia.
- [19]. W. Poespoprodjo, (1986), *Jejak-jejak Sejarah 1908-1926 Terbentuknya Suatu Pola,* Bandung: Remadja Karya.
- [20]. Wardiman Djonegoro, (1996), *Lima Puluh Tahun Perkembangan Pendidikan Indonesia,* Jakarta: Badan Penelitan dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan.
- [21]. Willy Toisuta, dkk, ([Tanpa Tahun]), *Ilmu Keguruan Pendidikan Nasional untuk SPG,* Jakarta: Depdikbud.

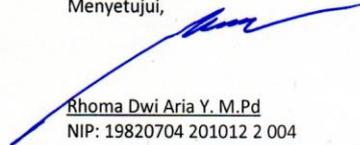
**Majalah**

- [1]. Inspeksi Pusat Pendidikan Djasmani, (1956), Pengumuman No. 202/PDP/B-'56.tgl. 29 Maret 1956. *Sekolah Lanjutan Kita*, Tahun Ke V.
- [2]. Pengumuman, No. 070/PDP/B-55 tgl. 31/3-55. *Sekolah Lanjutan Kita*, Tahun Ke IV.
- [3]. Inspeksi Pusat Pendidikan Djasmani, (1953), Penerimaan Murid baru untuk SGPD, *Sekolah Lanjutan Kita*, Jakarta: Kementrian P.P.K, Tahun ke III.

Reviewer,

  
Dr. Dyah Kumalasari, M.Pd.  
NIP. 19770618 200312 2 001

Yogyakarta, 31 Agustus 2016  
Menyetujui,

  
Rhoma Dwi Aria Y. M. Pd  
NIP: 19820704 201012 2 004